

PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA THAILAND

Afifah Dina Fatin¹, Djoko Siswanto M.²

^{1,2}Universitas Hang Tuah Surabaya

dina.fisip20@hangtuah.ac.id¹, djoko.siswanto@hangtuah.ac.id²

Correspondence Author: djoko.siswanto@hangtuah.ac.id

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

4 September 2023

Reviewed

17 September 2023

Accepted

20 September 2023

Published

30 Maret 2024

Di dalam studi Perbandingan Administrasi Negara terkandung aspek yang relevan, yakni aspek Administrasi Negara yang mengandung pengertian umum tentang bagaimana lembaga-lembaga negara tumbuh dan hidup didalam suatu negara menjalankan fungsinya. Administrasi negara bukan merupakan bidang studi yang memiliki pengertian serta sifat yang umum dan berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu bidang studi yang tidak diterapkan di dalam suatu negara dengan multidisipliner. Administrasi negara pada hakikatnya merupakan salah satu aspek dari administrasi yang menekankan pembahasan pada bidang kenegaraan. Berbagai pendapat mengemukakan tentang pengertian atau batasan administrasi yang merupakan induk dari administrasi negara, namun secara umum dapat diidentifikasi pengertian atau batasan tersebut,

mengandung unsur-unsur: unsur proses penyelenggaraan, unsur kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan unsur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Susunan pemerintahan dapat diartikan sebagai permintaan lengkap yang terdiri dari berbagai bagian pemerintah yang bekerja sama mengandalkan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan unsur-unsur pemerintahan. Terlepas dari kenyataan bahwa sistem pemerintahan masing-masing negara ada kalanya berbeda satu sama lain. Wawasan kita juga bisa dijadikan bahan perbandingan bagi negara kita karena kita akan memperoleh pemahaman tentang sistem pemerintahan negara lain. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui persamaan dan perbedaan antara berbagai sistem pemerintahan, kita dapat merancang sistem yang dianggap lebih unggul.

Kata kunci: pemerintah, perbandingan, administrasi negara

ABSTRACT

In the study of Comparative Public Administration, there is a relevant aspect, namely the aspect of Public Administration which contains a general understanding of how state institutions grow and live in a country carrying out their functions. State administration is not a field of study that has a general understanding and nature and stands alone, but is a field of study that is not applied in a country with multidisciplinary. State administration is essentially one aspect of administration that emphasizes discussion in the field of statehood. Various opinions have suggested the definition or limits of administration which is the parent of state administration, but in general it can be identified that the definition or limits contain elements: elements of the organizing process, elements of cooperation carried out by more than one person and elements of achieving predetermined goals. The structure of government can be interpreted as a complete request consisting of various parts of government that work together relying on and influencing in achieving the objectives and elements of government. Despite the fact that each country's system of government may differ from one another. Our insights can also be used as a comparison for our country because we will gain an understanding of other countries' government systems. Therefore, once we know the similarities and differences between the various systems of government, we can design a system that is considered superior.

Keywords: government, comparison, public administration

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi dalam wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang diakui oleh rakyatnya, dimana terbagi atas beberapa unsur yaitu adanya wilayah, adanya pemerintahan, adanya rakyat dan adanya pengakuan/kedaulatan. Sedangkan administrasi adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama dan untuk perbandingan adalah dua hal atau lebih yang di bandingkan dengan hal yang lainnya. Administrasi negara perbandingan merupakan perbandingan administrasi di dua negara atau lebih yang berbeda. Mengingat pula pendekatan terhadap administrasi negara itu berbeda-beda, maka akan melahirkan pandangan yang berbeda pula. Dari perbedaan tersebut maka lahirlah perbandingan. Pada dasarnya perbandingan dilakukan untuk mengetahui berbagai macam organisasi kenegaraan serta kegiatan setiap organisasi dalam mencapai tujuan negaranya.

Dapatlah diberikan pengertian ataupun batasan bahwa administrasi negara mengandung suatu pengertian kolektif yang meliputi segenap proses penyelenggaraan negara sebagai suatu organisasi yang meliputi organ/lembaga berikut fungsi masing-masing yang tumbuh dan hidup dalam suatu negara, dan semuanya itu diarahkan kepada pencapaian tujuan negara yang bersangkutan.

Di Indonesia proses desentralisasi sudah dimulai sejak tahun 1903, ketika Pemerintah Belanda mengeluarkan suatu undang-undang Desentralisasi yang disebut dengan "*Decentralizatie Wet*", di mana daerah dibagi-bagi menjadi Karesidenan dan Kota (*Gementee*). Kemudian pada tahun 1922, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menyempurnakan pemerintahan daerah dengan mengeluarkan Undang-undang Restrukturisasi Administrasi, di mana gementee dibagi menjadi Kota dan Kabupaten.

Sementara itu perkembangan pemerintahan daerah di Thailand, yang merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mendapatkan kemerdekaannya dari tangan penjajah, sesuai dengan perkembangan pemerintah yang menganut sistem monarki absolut. Sejak itu Thailand telah melaksanakan sistem pemerintah daerah selama 70 tahun dengan mengambil contoh-contoh dari negara-negara Eropa, dimana keluarga kerajaan banyak belajar dan mengadopsinya melalui pembuatan konstitusi yang dapat diterima oleh rakyat Thailand. Selama ini Thailand telah 16 kali merubah konstitusinya dan terakhir konstitusi baru telah dibuat pada tahun 1998, di mana banyak hal-hal yang mengatur pemerintah daerah.

METODE

Metodologi yang digunakan pada artikel ini yaitu studi pustaka. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui jurnal penelitian, internet, buku dan *e-book* yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

HASIL

Menurut Dwight Waldo, administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Gerald E. Caiden dalam bukunya *Public Administration* memberikan patokan bahwa untuk menemukan patokan untuk menentukan apakah suatu organisasi tersebut termasuk pemerintah adalah dengan melihat tiga hal, yaitu organisasinya dibentuk dengan peraturan pemerintah, karyawannya disebut pegawai negeri, dan pembiayaannya berasal dari uang rakyat.

Dari definisi-definisi diatas mengenai sistem, administrasi, negara, dan administrasi negara dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi negara adalah kegiatan yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang saling berkaitan dan berinteraksi di dalam suatu organisasi tertinggi yaitu negara untuk mencapai tujuan bersama.

Secara singkat SANKRI/SANRI membahas tentang administrasi negara indonesia sebagai suatu sistem mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang didalamnya membahas tentang koordinasi dan hubungan kerja dalam pemerintahan negara.

Menurut E. Utrecht, administrasi negara adalah aparat atau gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan pemerintah, dan melaksanakan tugas yang tidak

ditugaskan kepada badan-badan pengadilan dan legislatif. Sedangkan Prof. Prayudi Atmosudirdjo mengemukakan tiga arti administrasi negara, yaitu :

- a. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau instansi politik (kenegaraan) artinya meliputi organ yang berada di bawah pemerintah mulai dari presiden, menteri (termasuk gubernur, bupati dan sebagainya). Intinya adalah semua organ yang menjalankan administrasi negara.
- b. Sebagai fungsi aktifitas yakni sebagai kegiatan pemerintahan artinya sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara.
- c. Sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menjalankan undang-undang.

Unsur-unsur administrasi negara:

1. Manusia; pejabat kenegaraan atau pemerintahan dan masyarakat yang dilibatkan.
2. Tujuan; mewujudkan kebijakan negara, memecahkan permasalahan negara,
3. memenuhi kebutuhan masyarakat dan melayani masyarakat.
4. Kerja sama; berbagai mekanisme dan cara kerja (rencana program, prosedur, briefing, rapat dan sebagainya).
5. Sarana; dana, gedung, kantor, perabotan, kendaraan, dsb.

Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu memiliki suatu konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”, sebagai negara kesatuan dan memiliki konstitusi yang jelas tentu kewajiban negara adalah memperkuat bentuk negara, cara memperkuat bentuk negara tersebut dinyatakan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 ayat (5) bahwa “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi tujuh kunci pokok, yaitu: Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum.

1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa antara pengertian hukum dengan pengertian kekuasaan dipertentangkan.
2. Sistem konstitusional
3. Pemerintahan Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Ketentuan ini memberi ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi dan dipagari oleh ketentuan konstitusi. Ketentuan ini mencakup secara otomatis ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional.
4. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR.
5. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah MPR.
6. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
7. Menteri ialah pembantu Presiden.
8. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

Mengenai sistem ekonomi Indonesia, saat ini Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila (demokrasi otonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal.

Negara Thailand secara resmi disebut Kerajaan Thailand (*The Kingdom Of Thailand*), didalam bahasa Thailand sendiri disebut ราชอาณาจักรไทย dibaca *Rātcha-āṅāchak Thai, Rāja-ādnyācakra Thai, atau Prathēt Thai, Pradēsa Thai*, atau *Mueang Thai* dibaca: "meng-thai", dimana persis dengan versi bahasa Inggrisnya, yang berarti "Negeri Thai".

Ditinjau dari segi geografis negara Thailand terbagi menjadi enam bagian antara lain, di bagian utara terdapat perbukitan dimana gajah-gajah bekerja di hutan dan udara musim dinginnya cukup baik. Disebelah timur laut terdapat plateau yang luas yang berbatasan dengan Sungai Mekong, dataran tengah yang sangat subur, daerah pantai timur dengan resor-resor musim panas di atas hamparan pasir putih, pegunungan dan lembah di barat, serta daerah selatan yang sangat cantik. Disebelah barat dan utara berbatasan dengan Myanmar, di timur laut berbatasan dengan Laos, di timur berbatasan dengan Kamboja dan sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Kekuasaan tertinggi negara ini dipegang oleh seorang Raja. Sistem pemerintahannya adalah konstitusional Monarki absolute. Dalam pemerintahannya negara Thailand dipimpin oleh Perdana Menteri dari anggota-anggota parlemen dari pemimpin partai yang

mayoritas. Semenjak pembaharuan politik dari negara raja mutlak pada tahun 1932, Thailand telah mengalami 17 perlembagaan dan piagam. Selama ini, bentuk kerajaan sering berubah-ubah dari diktator tentera ke demokrasi berpilihan raya, namun semua kerajaan ini mengiktiraf raja turun-temurun sebagai ketua negara.

Perlembagaan 1997 adalah perlembagaan pertama yang digubal oleh Perhimpunan Mendraf Perlembagaan yang dipilih orang ramai, maka itu digelaranya "Perlembagaan Rakyat". Perlembagaan 1997 mewujudkan satu perundangan dwidewan yang terdiri daripada Dewan Rakyat (สภาผู้แทนราษฎร, *Sapha Phutan Ratsadon*) 500 kerusi dan Senat (วุฒิสภา, *Wuthisapha*) 200 kerusi. Buat julung kalinya dalam sejarah Thai, kedua-dua dewan ini dipilih melalui undian orang ramai. Banyak hak asasi manusia yang diakui dengan jelas sekali, dan langkah-langkah diambil untuk meningkatkan kestabilan kerajaan terpilih. Ahli-ahli Dewan Rakyat dipilih melalui sistem *first-past-the-post*, iaitu hanya seorang calon dengan majoriti mudah boleh dipilih dalam satu kawasan undian. Ahli-ahli Senat pula dipilih berdeasarkan sistem wilayah, yaitu satu wilayah boleh memberikan lebih daripada seorang Senator bergantung kepada bilangan penduduknya. Ahli-ahli Dewan Rakyat berkhidmat dalam penggal empat tahun, sementara ahli Senat pula penggal enam tahun. Sistem mahkamah (ศาล, *saan*) mernagkumi sebuah mahkamah perlembagaan yang bidang kuasanya meliputi keperlembagaan akta-akta parlimen, titah raja, dan hal-hal politik.

Faktor – Faktor Ekologis yang Mempengaruhi Administrasi Negara Thailand:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi Thailand tidak didasarkan pada sistem pasar, tetapi berdasarkan pada sistem redistribusi. Kegiatan export-import dikendalikan oleh Raja. Barang yang dihasilkan dihimpun dalam satu pusat penimbunan pusat, kemudian pusat membagi ke dalam sektor-sektor tertentu dalam jumlah tertentu. Jabatan-jabatan administrasi negara didistribusikan oleh Raja kepada pegawai-pegawainya dalam melakukan distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu terdapat percampuran antara ekonomi dengan administrasi. Sehingga tidak dapat dibedakan antara tindakan Raja sebagai administrator atau sebagai ekonomi.

Dalam modernisasinya sistem redistribusi berangsur berubah menjadi sistem pasar yang diperkenalkan melalui pandangan baru dan pengaruh dari dunia luar. Demikian pula dengan fungsi administrasi negara yang berkembang dari fungsi sebagai aparat Raja untuk menguasai rakyatnya, kemudian berfungsi sebagai public service. Namun tugas dan fungsi yang dikerjakan oleh administrasi bertambah banyak dan semakin kompleks, sehingga menambah anggaran belanja. Pertambahan anggaran tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas di bidang ekonomi, hal ini menyebabkan administrasi negara mengalami keterbatasan alat-alat dan fasilitas.

Terdapat persamaan ciri-ciri antara ekonomi redistribusi dengan ekonomi pasar. Hal ini juga mempengaruhi administrasi negara dilihat dari jabatan-jabatan yang diisi dengan seleksi melalui ujian kompetensi, terdapat juga jabatan-jabatan yang tersedia untuk kalangan-kalangan tertentu.

Mata Pencapaian penduduk Thailand sebagian besar adalah bertani (Agralis) hasil pertanian yang utama adalah beras. Thailand merupakan lumbung beras dikawasan Asia Tenggara. Hasil Tambang yang utama adalah timah dan mangan. Pariwisata Merupakan sumber Penghasilan Devisa yang besar bagi Thailand. Mata Uang Thailand adalah Bath; Hasil pertanian, Beras, Karet, Jagung, tapioca, Gula, Rami, Kelapa; Hasil tambangnya Antimonium, Timah, Besi, Manggan; Hasil Industri dari Thailand Elektronik, Berlian, Pakian, dan Teksti; dan Pendapatan Perkapita \$ 2750 (2005).

Pendapatan Perkapita US \$ 2750 (2005) Setelah menikmati rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia dari tahun 1985 hingga 1995 - rata-rata 9% per tahun - tekanan spekulatif yang meningkat terhadap mata uang Kerajaan Thai, Baht, pada tahun 1997 menyebabkan terjadinya krisis yang membuka kelemahan sektor keuangan dan memaksa pemerintah untuk mengambangkan Baht. Setelah sekian lama dipatok pada nilai 25 Baht untuk satu dolar AS, Baht mencapai titik terendahnya pada kisaran 56 Baht pada Januari 1998 dan ekonominya melemah sebesar 10,2% pada tahun yang sama. Krisis ini kemudian meluas ke krisis finansial Asia.

Kerajaan Thai memasuki babak pemulihan pada tahun 1999; ekonominya menguat 4,2% dan tumbuh 4,4% pada tahun 2000, kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat - yang

meningkat sekitar 20% pada tahun 2000. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak pada tahun 2001, namun kembali menguat pada tahun-tahun berikut berkat pertumbuhan yang kuat di RRC dan beberapa program stimulan dalam negeri serta Kebijakan. Dua Jalur yang ditempuh pemerintah Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 6,3%, dan diperkirakan pada 8% dan 10% pada tahun 2004 dan 2005. Sektor pariwisata menyumbang banyak kepada ekonomi Kerajaan Thai, dan industri ini memperoleh keuntungan tambahan dari melemahnya Baht dan stabilitas Kerajaan Thai. Kedatangan wisatawan pada tahun 2002 (10,9 juta) mencerminkan kenaikan sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya (10,1 juta).

2. Faktor Sosial

Di Thailand organisasi-organisasi sosial tidak didasarkan atas kepentingan-kepentingan khusus dan keanggotaannya pun tidak didasarkan atas sukarela. Organisasi sosialnya didasarkan pada particularistic, yaitu berdasar pada hal-hal tertentu saja seperti agama, keturunan, status dan sebagainya dan dijalankan sesuai dengan fungsinya. Pengaruh faktor sosial terhadap administrasi negara, administrasi tidak berperan dalam pembuatan kebijakan yang tepat untuk rakyat, melainkan berperan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk rakyat dan menilai apakah kelompok-kelompok sosial berpartisipasi untuk Raja atau sebaliknya.

Negara Thailand struktur kelasnya tidak tertutup atau terbuka, melainkan diantara tertutup dan terbuka meskipun sifatnya lebih berat. Seperti keluarga Raja atau bangsawan- bangsawan dari generasi ke generasi dapat menjadi orang biasa. Sebaliknya orang-orang biasa yang mendapat penghargaan dari Raja dapat naik ke tingkat atas. Walaupun demikian terdapat keluarga Raja yang tidak mendapat posisi, tetapi adapula keluarga orang biasa yang menduduki posisi-posisi yang relatif tinggi.

Setelah mengalami modernisasi masyarakat yang semula tergabung dalam organisasi sosial yang berdasar pada asas particularistic kemudian berhimpun dalam organisasi baru yang bercorak *association* (atas dasar kepentingan bersama). Yang mempunyai peranan dan mempengaruhi administrasi Negara yaitu organisasi yang bersifat particularistic, karena organisasi baru yang bercorak *association* belum meresap di kalangan masyarakat sehingga belum mempunyai pengaruh terhadap administrasi Negara.

Dalam struktur kelasnya, Negara Thailand berangsur bersifat terbuka, yang mempunyai dampak terhadap administrasi Negara. Dengan sifat struktur yang terbuka maka terdapat kemungkinan adanya perpindahan dari satu kelas ke kelas yang lain. Sehingga terdapat kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tadinya tidak dapat menduduki jabatan tertentu, setelah adanya struktur terbuka ini kelompok tersebut dapat menduduki jabatan tertentu bahkan yang tertinggi sekalipun.

3. Faktor Jaringan Komunikasi

Dalam bidang komunikasi, Negara Thailand bermasalah pada penggunaan bahasa yang masih beraneka ragam. Karena bahasa yang digunakan oleh Kerajaan/Istana berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tidak dapat dipahami oleh rakyat karena perbedaan bahasa yang digunakan. Dampaknya terhadap administrasi negara, yaitu perilaku administrasi negara yang kurang responsif terhadap permintaan publik karena adanya *communication-gap* tersebut. Perilaku administrasi negara kurang mencerminkan keinginan-keinginan dari masyarakat begitu pun sebaliknya. Administrator negara cenderung bertindak arbiter (sewenang-wenang).

Pada perkembangannya masyarakat Thailand sedikit demi sedikit sudah mulai mobilisasi dan terasimilasikan. Dengan adanya komunikasi terbuka tersebut dan administrasi Negara dengan alat-alat terbatas, maka dengan bahasa yang sudah cukup dimengerti dapat menyampaikan program-programnya dan harapan-harapan rakyat disampaikan kepada pemerintah. Namun karena komunikasi yang sangat terbatas, maka masyarakat belum dapat mengontrol secara efektif administrasi negara begitupun sebaliknya.

4. Faktor Simbol Sistem

Thailand memiliki simbol tradisional yaitu raja mempunyai dasar yang sakral dan kerajaan merupakan ciptaan Tuhan yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Hal yang bersifat sakral

diwujudkan pada diri Raja yang dianggap sebagai keturunan yang memperoleh mandat dari Tuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Lambat laun negara Thailand mendapat pengaruh dari luar symbol tersebut berubah menjadi simbol baru yaitu kedaulatan rakyat. Pemerintahan tidak dilakukan lagi oleh Raja seorang diri tetapi perlu didampingi oleh badan yang mewakili rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat.

5. Faktor politik

Negara Thailand sistem pemerintahan bersifat otokratis, kekuasaan penuh dijalankan atau diatur sepenuhnya oleh Raja. Keadaan seperti ini kurang atau tidak berpartisipasi dalam pemerintahan atau politik. Tindakan-tindakan Raja tidak hanya di bidang politik saja namun disemua bidang, sehingga sulit untuk melihat pengaruh politik terhadap administrasi negara. Dalam konteks administrasi negara Thailand yang bersifat otokratis, maka inputnya adalah Raja. Raja yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan hanya Raja saja yang mempunyai bahan untuk membuat keputusan. Sedangkan outputnya berupa policy dan Raja yang melaksanakannya. Jadi administrasi Negara Thailand merupakan produk dari lingkungan sosialnya.

DISKUSI

Mengenai pembahasan tentang sistem administrasi negara Indonesia dengan Thailand, maka ada beberapa perbedaan atau perbandingan yang bisa kita peroleh, yaitu:

1. Bentuk Negara

Bentuk negara Indonesia adalah republik. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yakni, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja.

Bentuk negara Thailand secara resmi disebut Kerajaan Thailand (*The Kingdom Of Thailand*), didalam bahasa Thailand sendiri disebut ราชอาณาจักรไทย dibaca *Rāṭcha- āṇāchak Thai*, *Rāja-ādnyācakra Thai*, atau *Prathēt Thai*, *Pradēsa Thai*, atau *Mueang Thai* dibaca: "meng-thai", dimana persis dengan versi bahasa Inggrisnya, yang berarti "Negeri Thai".

2. Kekuasaan

Kekuasaan negara Indonesia yang tertinggi di tangan MPR. MPR (mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah). Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri ialah pembantu Presiden. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang tertinggi. BPK (memeriksa semua keuangan negara). Komisi Yudisial (mengangkat dan mengurus citra hakim). Mahkamah Konstitusi (menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan). DPR (persetujuan dalam pembentukan dan pengawasan pelaksanaan UU). DPD (membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan).

Kekuasaan negara Thailand yaitu Monarki Konstitusional. Menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Monarki Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun, Monarki tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintah sehari-hari.

3. Sistem Pemerintah

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan atas hukum. Sistem Administrasi Negara di Indonesia di pengaruhi oleh sistem Administrasi Negara Perancis melalui Belanda. Sistem Konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Para penyelenggara pemerintah dalam melakukan tugasnya harus berdasarkan hukum/peraturan, dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, para penyelenggara/pelaksana administrasi negara tidak diperkenankan melakukan tugas hanya atas dasar kekuasaan yang dimilikinya (tidak bertindak semena-mena).

Sistem pemerintahan Thailand adalah sistem parlementer. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah

pemimpin partai mayoritas. Lembaga legislatif, gedung parlemen terdiri dari Senat, memegang posisi selama 5 tahun dari pemilihan dan pengangkatan juga Dewan Perwakilan Rakyat, memegang posisi selama 4 tahun dari pemilihan daerah. (NSO, 2020). Sistem pemerintahan bersifat otokratis, kekuasaan penuh dijalankan atau diatur sepenuhnya oleh Raja.

4. Parlemen

Parlemen negara Indonesia menurut Konstitusi RIS atau setelah reformasi dan setelah UUD 1945 diamandemen (periode 2004-sekarang) yang dianut adalah Bikameral (DPR RI dan DPD RI). Anggota DPR dipilih rakyat melalui pemilu dengan sistem proposional terbuka. DPD dipilih rakyat secara langsung melalui pemilu yang berasal dari masing-masing provinsi dengan sistem pemilihan distrik perwakilan terbanyak. MPR menunjuk Presiden sebagai mandataris MPR untuk menjalankan tugas MPR. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara, kekuasaan, dan tanggung jawab di tangan Presiden. Kedudukan Presiden tidak tergantung DPR (Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan begitu pula sebaliknya DPR tidak bisa menjatuhkan Presiden). Presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri negara.

Parlemen negara Thailand menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha, yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisapha) yang beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung (Sandika). Bidang Kehakiman meliputi pengadilan negeri, mahkamah konstitusi, dan peradilan tata usaha negara, yang anggotanya berasal dari sistem selektif. Saat ini Thailand berada di bawah Konstitusi 2017. Administrasi Publik Thailand memiliki tiga tingkatan pemerintahan: Administrasi Pusat yang terdiri dari kementerian dan birokrasi. Administrasi Provinsi yang terdiri dari 76 provinsi kecuali Bangkok, dan Administrasi Lokal yang terdiri dari organisasi administrasi provinsi, organisasi administrasi kota, organisasi administrasi distrik, Bangkok dan Daerah Administratif Khusus Pattaya. Bangkok berperan sebagai pusat administrasi publik negara, Bangkok juga merupakan ibu kota dan kota terbesar di negara itu yang punya sejarah panjang (NSO, 2020).

5. Ekonomi

Saat ini Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila (demokrasi otonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal. Pada laman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPPI) dijelaskan bahwa SEP merupakan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotog royong dan saling menguatkan. Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9.

Sistem ekonomi Thailand tidak didasarkan pada sistem pasar, tetapi berdasarkan pada sistem redistribusi. Dalam modernisasinya sistem redistribusi berangsur berubah menjadi sistem pasar yang diperkenalkan melalui pandangan baru dan pengaruh dari dunia luar. Gambaran keseluruhan ekonomi Thailand pada tahun 2019, PDB negara adalah 16,879.0 miliar baht. Untuk ekspor nilainya sebesar 7.627,7 miliar baht, sedangkan nilai impornya sebesar 7.437,3 miliar baht.

6. Militer

Indeks kekuatan militer Indonesia menempati peringkat 16 dari 140 negara. Jika merujuk situs GFP, Indonesia bahkan menjadi negara yang terkuat secara militer di kawasan ASEAN. Dengan begitu Indonesia jauh berada di atas Singapura yang berada di peringkat 40, di mana notabene merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, unggulnya kekuatan militer Indonesia dibandingkan Spanyol, Australia, dan Israel juga karena ditopang oleh jumlah personel tentara yang besar yakni 1.080.000. Adapun jumlah personel militer aktif Indonesia tercatat sebesar 400.000, jumlah personel cadangan tercatat sebesar 400.000, dan jumlah paramiliter tercatat sebanyak 280.000. Luasnya Indonesia juga turut mempengaruhi banyaknya jumlah alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dimiliki oleh matra darat, laut, dan udara. Banyaknya jumlah alutsista turut menunjang peringkat kekuatan militer Indonesia yang dirilis GFP. Dalam situs GFP, kekuatan matra udara Indonesia memiliki 458 unit armada yang terdiri dari pesawat angkut, pesawat tempur, dan helikopter. Adapun jumlah pesawat tempur Indonesia hanya 41 unit.

Militer negara Thailand berada pada peringkat 26 militer terkuat dari 140 negara yang dipertimbangkan. Posisinya berada diatas negara Turki dan dibawah negara Indonesia. Thailand tercatat mempunyai 361,000 personel aktif dan 200,000 personel cadangan. Pasukan udara Thailand mempunyai total 587 unit personel, yaitu 75 jet tempur, 18 pesawat pengebom, 50 pesawat pengangkut, 163 pesawat latihan, 20 jet misi special, 261 helikopter, dan 7 helikopter penyerang. Pasukan darat Thailand mempunyai 840 tank, 2,500 kendaraan lapis baja, 53 artileri swagerak, 583 artilery biasa, dan 17 proyektor roket. Pasukan Laut Thailand mempunyai 292 aset, yaitu 1 kapal pengangkut helicopter (kapal induk), 7 kapal pengawal, 7 unit korvet, 49 kapal patrol, dan 5 *mine warfare*

7. Politik

Sistem politik negara Indonesia yaitu demokrasi (didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis). Politik Indonesia adalah kedaulatan rakyat/masyarakat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Negara Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang berdasarkan pada asas-asas Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pemerintahan ini dibangun dengan cara musyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat. Infrastruktur politik terdiri dari:

- a. Partai Politik;
- b. *Interest group* (kelompok kepentingan);
- c. *Pressure group* (kelompok penekan);
- d. *Media of political communication* (media komunikasi politik);
- e. *Journalism Group* (kelompok jurnalis);
- f. *Student Group* (kelompok pelajar);
- g. *Political figure* (figure-figure politik).

Supra struktur politik, yaitu suasana kehidupan politik di dalam pemerintahan dan berhubungan dengan peran dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan. Suprastruktur politik terdiri dari:

- a. Lembaga eksekutif (pemerintahan/presiden);
- b. Lembaga Legislatif (parlemen, DPR);
- c. Lembaga yudikatif (peradilan, Mahkamah Agung).

Sistem politik negara Thailand saat ini dilakukan dalam rangka sebuah monarki konstitusional yang demokratis, dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun temurun adalah kepala negara. peradilan independen dari eksekutif dan legislatif. Raja adalah kepala angkatan bersenjata dan penegak semua agama. Raja yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan hanya Raja yang mempunyai bahan bahan untuk membuat keputusan. Output berupa policy dan Raja yang melaksanakannya. Administrasi negara Thailand merupakan produk dari lingkungan sosialnya.

8. Sosial

Sistem sosial budaya Indonesia adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan sosial-budaya masyarakat di Indonesia berjalan secara rukun dan tentram. Semua daerah di Indonesia memiliki kehidupan sosial-budaya yang berbeda-beda namun tetap menghormati satu sama lain dan hidup berdampingan tanpa ada perpecahan dan perebutan kebudayaan.

Di Thailand organisasi-organisasi sosial tidak dasarkan atas kepentingan-kepentingan khusus dan keanggotaannyapun tidak didasarkan atas sukarela. Organisasi sosialnya didasarkan pada particularistic, yaitu berdasar pada hal-hal tertentu saja seperti agama, keturunan, status dan sebagainya dan dijalankan sesuai dengan fungsinya. Pengaruh faktor sosial terhadap administrasi

negara, administrasi tidak berperan dalam pembuatan kebijakan yang tepat untuk rakyat, melainkan berperan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk rakyat dan menilai apakah kelompok-kelompok sosial berpartisipasi untuk Raja atau sebaliknya.

Negara Thailand struktur kelasnya tidak tertutup atau terbuka, melainkan diantara tertutup dan terbuka meskipun sifatnya lebih berat. Seperti keluarga Raja atau bangsawan- bangsawan dari generasi ke generasi dapat menjadi orang biasa. Sebaliknya orang-orang biasa yang mendapat penghargaan dari Raja dapat naik ke tingkat atas. Walaupun demikian terdapat keluarga Raja yang tidak mendapat posisi, tetapi adapula keluarga orang biasa yang menduduki posisi-posisi yang relatif tinggi.

Dalam struktur kelasnya, Negara Thailand berangsur bersifat terbuka, yang mempunyai dampak terhadap administrasi Negara. Dengan sifat struktur yang terbuka maka terdapat kemungkinan adanya perpindahan dari satu kelas ke kelas yang lain. Sehingga terdapat kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tadinya tidak dapat menduduki jabatan tertentu, setelah adanya struktur terbuka ini kelompok tersebut dapat menduduki jabatan tertentu bahkan yang tertinggi sekalipun.

9. Jaringan Komunikasi

Sistem komunikasi Indonesia merupakan sebuah kajian ilmiah yang dikembangkan di perguruan tinggi sebagai upaya pengindonesiaan atau pribumisasi ilmu komunikasi dengan menggunakan wawasan keindonesiaan. Segala hubungan komunikasi manusia atau jaringan yang saling terhubung dan memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya.

Dalam bidang komunikasi, Negara Thailand bermasalah pada penggunaan bahasa yang masih beraneka ragam. Karena bahasa yang digunakan oleh Kerajaan/Istana berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tidak dapat dipahami oleh rakyat karena perbedaan bahasa yang digunakan. Dampaknya terhadap administrasi negara, yaitu perilaku administrasi negara yang kurang responsif terhadap permintaan publik karena adanya communication-gap tersebut. Perilaku administrasi negara kurang mencerminkan keinginan-keinginan dari masyarakat begitu pun sebaliknya. Administrator negara cenderung bertindak arbiter (sewenang-wenang).

Pada perkembangannya masyarakat Thailand sedikit demi sedikit sudah mulai mobilisasi dan terasimilasikan. Dengan adanya komunikasi terbuka tersebut dan administrasi Negara dengan alat-alat terbatas, maka dengan bahasa yang sudah cukup dimengerti dapat menyampaikan program-programnya dan harapan-harapan rakyat disampaikan kepada pemerintah. Namun karena komunikasi yang sangat terbatas, maka masyarakat belum dapat mengontrol secara efektif administrasi negara begitupun sebaliknya.

Kekurangan dan Kelebihan Sistem Administrasi Negara Thailand dan Indonesia:

1. Dengan sistem pemerintahan yang konstitusional monarki absolut kekuasaan pada raja tidak terbatas dengan kekuasaan tertinggi negara adalah raja sehingga pemerintahan bersifat otokratis, ini perlu diwaspadai karena khawatir terjadi penyelewengan kekuasaan, sistem ini condong ke arah sentralisasi. Tetapi ada nilai positifnya dari sistem ini karena dalam menentukan kebijakan pemerintah lebih simpel. Sedangkan sistem di Indonesia berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolut dengan kekuasaan tertinggi di tangan MPR, dan bersifat demokratis. Disini dalam melakukan kebijakan terdapat pembagian kekuasaan sehingga akan meminimalisir penyelewengan kekuasaan, tetapi dalam menentukan kebijakan lebih ribet dari pada sentralisasi karena harus mendapatkan persetujuan dari badan- badan lain.
2. Di bidang sosial, organisasi sosial berdasar pada particularistic yaitu berdasar pada hal-hal tertentu saja seperti agama, keturunan, dan sebagainya dan dijalankan sesuai fungsinya. Negatifnya pengaruh faktor sosial terhadap administrasi negara, ini berperan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk rakyat dan menilai apakah kelompok- kelompok sosial berpartisipasi untuk Raja atau sebaliknya. Tetapi dengan modernisasi dari particularistik kemudian berhimpun ke organisasi yang bercorak association (atas dasar kepentingan bersama).
3. Struktur kelas di Thailand berangsur terbuka, yaitu kemungkinan adanya perpindahan dari kelas satu ke kelas lain, dari yang rendah ke tinggi ataupun sebaliknya. Hal ini berdampak positif, karena ini artinya pemerintah memberikan kebebasan untuk memperoleh derajat yang tinggi dengan

prestasi-prestasi, pengabdian-pengabdian kepada negara yang ia peroleh dan ia lakukan. Di Indonesia pun sama seperti ini, namun terkadang perilaku nepotisme dari aparat pemerintah sering terjadi.

4. Di bidang jaringan komunikasi, dalam pengorganisasian penggunaan bahasa kurang baik dibandingkan dengan Indonesia. Karena di Indonesia walaupun memiliki bahasa yang beragam tetapi memiliki bahasa nasional yakni bahasa Indonesia sedangkan di Thailand antara bahasa yang digunakan di istana dengan masyarakat berbeda, maka dampaknya perilaku administrasi negara kurang responsif terhadap permintaan publik (administrator negara cenderung sewenang-wenang).

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi negara adalah kegiatan yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang saling berkaitan dan berinteraksi di dalam suatu organisasi tertinggi yaitu negara untuk mencapai tujuan bersama.

Faktor-faktor yang dapat dijadikan perbandingan sistem administrasi negara Indonesia dengan Thailand, yaitu:

1. Bentuk Negara

Bentuk negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik dan bentuk negara Thailand secara resmi disebut Kerajaan Thailand (*The Kingdom Of Thailand*).

2. Kekuasaan

Kekuasaan negara Indonesia yang tertinggi di tangan MPR. MPR (mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah). Kekuasaan negara Thailand yaitu Monarki Konstitusional. Menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Monarki Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun, Monarki tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintah sehari-hari.

3. Sistem Pemerintah

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan atas hukum sedangkan sistem pemerintahan Thailand adalah sistem parlementer. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang dimana sistem pemerintahan bersifat otokratis, kekuasaan penuh dijalankan atau diatur sepenuhnya oleh Raja.

4. Parlemen

Parlemen negara Indonesia menurut Konstitusi RIS atau setelah reformasi dan setelah UUD 1945 diamandemen (periode 2004-sekarang) yang dianut adalah Bikameral (DPR RI dan DPD RI). Parlemen negara Thailand menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha, yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisapha) yang beranggotakan 150 orang.

5. Ekonomi

Saat ini Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila (demokrasi otonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal. Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9.

Sistem ekonomi Thailand tidak didasarkan pada sistem pasar, tetapi berdasarkan pada sistem redistribusi. Gambaran keseluruhan ekonomi Thailand pada tahun 2019, PDB negara adalah 16,879.0 miliar baht. Untuk ekspor nilainya sebesar 7.627,7 miliar baht, sedangkan nilai impornya sebesar 7.437,3 miliar baht.

6. Militer

Indeks kekuatan militer Indonesia menempati peringkat 16 dari 140 negara. Adapun jumlah personel militer aktif Indonesia tercatat sebesar 400.000, jumlah personel cadangan tercatat sebesar 400.000, dan jumlah paramiliter tercatat sebanyak 280.000. Luasnya Indonesia juga turut mempengaruhi banyaknya jumlah alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dimiliki oleh matra darat, laut, dan udara. Banyaknya jumlah alutsista turut menunjang peringkat kekuatan militer Indonesia yang dirilis GFP. Dalam situs GFP, kekuatan matra udara Indonesia memiliki 458 unit armada yang

terdiri dari pesawat angkut, pesawat tempur, dan helikopter. Adapun jumlah pesawat tempur Indonesia hanya 41 unit.

Militer negara Thailand berada pada peringkat 26 militer terkuat dari 140 negara yang dipertimbangkan. Thailand mempunyai total 587 unit personel, yaitu 75 jet tempur, 18 pesawat pengebom, 50 pesawat pengangkut, 163 pesawat latihan, 20 jet misi special, 261 helikopter, dan 7 helikopter penyerang. Pasukan darat Thailand mempunyai 840 tank, 2,500 kendaraan lapis baja, 53 artileri swagerak, 583 artilery biasa, dan 17 proyektor roket. Pasukan Laut Thailand mempunyai 292 aset, yaitu 1 kapal pengangkut helicopter (kapal induk), 7 kapal pengawal, 7 unit korvet, 49 kapal patrol, dan 5 *mine warfare*.

7. Politik

Sistem politik negara Indonesia yaitu demokrasi (didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis). Politik Indonesia adalah kedaulatan rakyat/masyarakat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun.

Sistem politik negara Thailand saat ini dilakukan dalam rangka sebuah monarki konstitusional yang demokratis, dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun temurun adalah kepala negara. Raja adalah kepala angkatan bersenjata dan penegak semua agama. Raja yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan hanya Raja yang mempunyai bahan-bahan untuk membuat keputusan. Output berupa policy dan Raja yang melaksanakannya. Administrasi negara Thailand merupakan produk dari lingkungan sosialnya.

8. Sosial

Sistem sosial budaya Indonesia adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan sosial-budaya masyarakat di Indonesia berjalan secara rukun dan tentram. Semua daerah di Indonesia memiliki kehidupan sosial-budaya yang berbeda-beda namun tetap menghormati satu sama lain dan hidup berdampingan tanpa ada perpecahan dan perebutan kebudayaan.

Di Thailand organisasi-organisasi sosial tidak didasarkan atas kepentingan-kepentingan khusus dan keanggotaannya pun tidak didasarkan atas sukarela. Organisasi sosialnya didasarkan pada *particularistic*, yaitu berdasar pada hal-hal tertentu saja seperti agama, keturunan, status dan sebagainya dan dijalankan sesuai dengan fungsinya.

9. Jaringan Komunikasi

Sistem komunikasi Indonesia merupakan sebuah kajian ilmiah yang dikembangkan di perguruan tinggi sebagai upaya pengindonesian atau pribumisasi ilmu komunikasi dengan menggunakan wawasan keindonesiaan.

Dalam bidang komunikasi, Negara Thailand bermasalah pada penggunaan bahasa yang masih beraneka ragam. Karena bahasa yang digunakan oleh Kerajaan/Istana berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tidak dapat dipahami oleh rakyat karena perbedaan bahasa yang digunakan.

Kekurangan dan Kelebihan Sistem Administrasi Negara Indonesia dan Negara Thailand yaitu dengan sistem pemerintahan yang konstitusional monarki absolut kekuasaan pada raja tidak terbatas dengan kekuasaan tertinggi negara adalah raja sehingga pemerintahan bersifat otokratis, ini perlu diwaspadai karena khawatir terjadi penyelewengan kekuasaan, sistem ini condong ke arah sentralisasi. Tetapi ada nilai positifnya dari sistem ini karena dalam menentukan kebijakan pemerintah lebih simpel. Sedangkan sistem di Indonesia berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolut dengan kekuasaan tertinggi di tangan MPR, dan bersifat demokratis. Disini dalam melakukan kebijakan terdapat pembagian kekuasaan sehingga akan meminimalisir penyelewengan kekuasaan, tetapi dalam menentukan kebijakan lebih ribet dari pada sentralisasi karena harus mendapatkan persetujuan dari badan-badan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Utama, Putra. 2020. *Analisis Perbandingan Administrasi Negara Antara Indonesia Dengan Malaysia*. Tersedia: https://www.academia.edu/43512032/ANALISIS_PERBANDINGAN_ADMINISTRASI_NEGARA_ANTARA_INDONESIA_DENGAN_MALAYSIA_TUGAS_MANDIRI Diajukan untuk memenuhi Tugas Mata kuliah perbandingan administrasi negara Program studi administrasi negara Dosen pengampu h. [Mei 2023].
- Salsabila, Siti Aulia dan Muhammad Nur Ali. 2023. *Makalah Perbandingan Sistem Administrasi Negara (PSAN) Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dan Negara Jepang*. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/369229250_MAKALAH_PERBANDINGAN_SISTEM_ADMINISTRASI_NEGARA_PSAN. [Mei 2023].
- Johari. 2014. *Perbandingan Administrasi Negara*. Tersedia: <https://www.kompasiana.com/johari-upb/54f7ab8aa333119a1d8b46b6/perbandingan-administrasi-negara>. [Mei 2023].
- Ayammahasiswa. 2014. *Makalah Sistem Administrasi dan Perbandingan Antara Negara Thailand dan Negara Indonesia*. Tersedia: <http://ayammahasiswa.blogspot.com/2015/01/perbandingan-antara-negara-thailand-dan.html>. [Mei 2023].
- Repository. *Gambaran Umum Negara Thailand*. Tersedia: <http://repository.radenfatah.ac.id/18481/6/3.pdf>. [Mei 2023].
- Finaka, Andrean W. dan Rosi Oktari. 2022. *Kekuatan Militer Indonesia Peringkat 16 Dunia*. Tersedia: <https://indonesiabaik.id/videografis/kekuatan-militer-indonesia-peringkat-16-dunia>. [Mei 2023].